

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pers mempunyai peranan penting dalam negara demokrasi. Pers menjadi wahana bagi masyarakat untuk mengeluarkan pemikiran dan pendapat. Pers pada sistem politik demokrasi, dapat dinyatakan sebagai pilar keempat demokrasi (*The fourth of estate*) setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif (trias politica).¹ Pers sebagai pilar yang berada di luar sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*) dan media yang berpengaruh terhadap pembentukan opini publik. Melalui pemberitaan yang bebas, kritis dan objektif, pers ikut berperan dalam pembentukan opini publik serta saluran penyampaian aspirasi dari masyarakat.

Kebebasan pers juga merupakan tolak ukur dari kualitas demokrasi suatu negara. Kebebasan pers merupakan pilar fundamental dalam kehidupan demokrasi. Karena, hanya negara dengan sistem demokrasi saja yang mengizinkan kebebasan pers berjalan seutuhnya. Oleh karena itu, dinamika pers sendiri pasti berkaitan erat dengan dinamika politik demokrasi di sebuah negara.

Kebebasan pers di Indonesia sendiri terbelenggu sejak masa Orde Baru di bawah kepemimpinan rezim Soeharto. Kekangan terhadap kebebasan pers terlihat dalam adanya kontrol penuh yang dipegang oleh pemerintah melalui departemen penerangan, mekanisme perizinan yang ketat melalui Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), dan pembredelan. Barulah setelah gerakan reformasi muncul dan tumbang rezim Orde Baru, pers perlahan-lahan mulai lepas dari tekanan pemerintah. Reformasi seakan membawa angin segar bagi awal kebebasan pers di Indonesia.

¹Trisnaningrum et.al., "Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers Di Indonesia Dan Australia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54 (2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1593>, (2024), hlm 358.

Pers pada perkembangannya memiliki dua definisi, yakni pers dalam definisi luas dan pers dalam definisi sempit. Pers dalam definisi luas mencakup semua penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran, dan televisi siaran, sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita.²

Di Indonesia sendiri, definisi pers termaktub dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, pers diartikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.³

Penelitian ini menggunakan definisi pers secara sempit, yakni sebagai media cetak. Hal ini dilakukan karena pada masa awal Reformasi hingga pemerintahan Abdurrahman Wahid, perdebatan mengenai kebebasan pers dan intervensi negara sebagian besar terjadi dalam ruang media cetak, baik melalui pembredelan, regulasi penerbitan, maupun perdebatan etik jurnalistik. Media digital belum berkembang secara signifikan, sementara media penyiaran seperti televisi dan radio berada pada naungan payung hukum yang berbeda. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa media cetak menjadi aktor utama dalam pers pada masa tersebut.

Transisi menuju masa kebebasan pers dimulai pada era pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie. Sebagai presiden pertama yang menjabat pada era reformasi, B.J Habibie mengeluarkan sejumlah kebijakan yang membantu melonggarkan kehidupan pers di Indonesia pada saat itu. Ia mengubah peraturan tentang izin usaha penerbitan pers (SIUPP) serta mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam undang-undang tersebut, perihal

² Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi, Teori Dan Praktek Komunikasi Dalam Sebuah Organisasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 131.

³ Zainal Abidin Achmad, *Perbandingan Sistem Pers Dan Sistem Pers Indonesia*. (Surabaya: Sahaja, 2021), hlm 84.

kebebasan pers dicantumkan secara eksplisit. Pasal 4 undang-undang itu menyebutkan: (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran; (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi.⁴

Saat presiden Abdurrahman Wahid menjabat pada tahun 1999, kebebasan pers semakin terasa. Presiden Abdurrahman Wahid atau yang populer dengan nama Abdurrahman Wahid, merupakan seorang tokoh yang sangat menjunjung tinggi kebebasan individu, termasuk dalam hal kebebasan pers. Hal ini terbukti dalam pandangan yang ia miliki terkait kebebasan pers, yang tertuang dalam tulisannya yang berjudul *Kebebasan Pers dan Pembangunan Ekonomi*. Tulisan ini tertuang dalam kumpulan artikel yang digubah dalam buku yang berjudul “Tajuk-Tajuk Dalam Terik Matahari” dan terbit pada tahun 1993. Hal ini menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid mendukung kebebasan pers, bahkan sejak ia belum menjabat sebagai presiden.

Periode pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid ini merupakan suatu periode pemerintahan yang menarik untuk dikaji, terkhusus dalam hal pembahasan mengenai dunia pers. Abdurrahman Wahid memberikan dukungannya terhadap kebebasan pers yang tidak hanya dibuktikan dengan ucapan saja, tetapi juga dengan tindakan. Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan penghapusan Departemen Penerangan yang merupakan lembaga yang mengeluarkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Hal tersebut membuat media massa di Indonesia tidak memerlukan izin lagi untuk dapat terbit, sebab lembaga pemberi izinnya sudah tidak ada.⁵ Selain itu, Abdurrahman Wahid juga memperkuat posisi Dewan Pers sebagai sebuah lembaga yang independen yang mengatur etika dan profesionalisme jurnalisisme.

Pembubaran Departemen Penerangan secara resmi dan teknis membuat dunia pers terlepas dari kekangan pemerintah. Langkah-langkah yang dilakukan

⁴ Awang Ruswandi, “Menakar Kadar Kebebasan Pers Indonesia,” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 5, no. 2 (2004), hlm 268.

⁵ *Ibid.*

Abdurrahman Wahid ini menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebebasan pers. Hal ini membuat pers semakin gencar melakukan peliputan kasus di berbagai bidang, termasuk politik. Hal ini menimbulkan suatu paradoks yang menarik, karena presiden Abdurrahman Wahid sendiripun tak luput dari pemberitaan dan kritik yang dilakukan oleh pers. Kebebasan pers yang semakin luas mendorong munculnya pemberitaan-pemberitaan yang semakin kritis dan dekat dengan isu-isu kontroversial. Kebebasan ini menimbulkan kekhawatiran, hal ini dapat terlihat dari munculnya kritik-kritikan dari pihak pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu.⁶ Hal ini menimbulkan gesekan-gesekan tajam antara kebebasan yang diberikan kepada pers dan pelaksanaan pers itu sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu memang telah menyinggung mengenai perkembangan kebebasan pers pasca reformasi, seperti tulisan Satrio Saptohadi tahun 2011 yang bertajuk *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia* serta penelitian Awang Ruswandi tahun 2004 yang berjudul *Menakar Kadar Kebebasan Pers Indonesia 1998-2003*. Kedua penelitian tersebut cenderung membahas kondisi kebebasan pers di Indonesia dalam konteks umum serta rentang waktu yang cukup panjang. Tulisan Solahudin tahun 2001 yang berjudul *Amuk Massa Gus Dur* yang di dalamnya merincikan berbagai tekanan yang dihadapi pers sejak Mei 2000 hingga Mei 2001 yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penulis menemukan *research gap* yang signifikan. Penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas mengenai kondisi kebebasan pers dalam konteks umum saja. Pembahasannya menggunakan rentang waktu yang cukup panjang, tidak berfokus di pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid sendiri. Buku Solahudin sendiri hanya membahas mengenai tekanan yang dihadapi oleh pers pada masa presiden Abdurrahman Wahid saja. Oleh karena itu penulis berupaya melakukan penelitian yang berjudul “Dinamika Kebebasan Pers Pada Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.” Untuk melengkapi celah kekosongan pada topik tersebut. Penelitian ini akan mengambil ruang yang belum banyak dibahas di penelitian-penelitian

⁶ Satrio Saptohadi, “Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, no 1, (2011), hlm 135.

sebelumnya, seperti pembahasan mengenai komparasi pola pemberitaan antar tiga media, yakni Tempo, Kompas dan Jawa Pos serta analisis hubungan pemerintah dengan media pada masa tersebut. Pembahasan-pembahasan tersebut diharapkan dapat mengisi celah kekosongan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Era Reformasi memberikan dampak besar pada dunia pers, termasuk dari segi kuantitas. Sebelum reformasi yakni tahun 1997, jumlah media cetak di Indonesia hanya mencapai 289. Pasca reformasi tepatnya tahun 1999, jumlah media cetak meningkat hampir 600% menjadi 1.687.⁷ Media cetak bermunculan dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Media-media tersebut juga memiliki keragaman serta ciri khas masing-masing yang berbeda. Lonjakan kemunculan media ini memberikan warna yang cukup kompleks dalam dinamika kebebasan pers di Indonesia pada masa tersebut.

Penelitian ini akan membatasi fokus pada tiga media cetak nasional, hal ini dilakukan agar analisis dapat berjalan secara fokus, terarah, dan mendalam. Tiga media tersebut adalah *Tempo*, *Kompas*, dan *Jawa Pos*. Pemilihan ketiga media tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Ketiga media tersebut mewakili berbagai hal yang beragam dalam pers Indonesia pada masa tersebut. *Tempo* dipilih sebagai representasi media kritis yang memiliki perjalanan panjang di Indonesia, bahkan sejak era Orde Baru. *Tempo* acapkali menerbitkan pemberitaan yang kritis berkaitan dengan politik, hal ini menyebabkan *Tempo* sempat mengalami pembredelan pada masa Orde Baru, yakni pada tahun 1982 dan 1994.⁸

Kompas dipilih sebagai salah satu media yang akan dibahas dalam penelitian ini, karena posisinya sebagai media konglomerasi besar yang berdiri pada tahun 1965 dan terus berkembang serta bertahan hingga saat ini. Hal ini terbukti dengan pencapaian *Kompas* sebagai media cetak dengan penguasaan pasar paling tinggi sejak 1998 hingga 2006.⁹ *Jawa Pos* dipilih sebagai salah satu media yang akan

⁷ Rahmi Winangsih, Peranan media massa dalam kehidupan masyarakat dewasa ini ditinjau dari perspektif ekonomi politik media. dalam *Perubahan sosial sebuah bunga rampai*, ed Agus Sjafari (Serang: FISIP Untirta, 2011), hlm 57.

⁸ Nuresa Febriasti Rosyada et.al., “Pembredelan Majalah *Tempo* Pada Masa Orde Baru.” *Prabayaksa: Journal of History Education*, 2 no 1(2022), hlm 44.
<https://doi.org/10.20527/pby.v2i1.4675>.

⁹ Iwan Awaludin Yusuf, “Analisis Konglomerasi Industri Pers Daerah Di Indonesia: Pendekatan S-

dibahas dalam penelitian ini, karena *Jawa Pos* merupakan media konglomerasi besar yang menjadi jaringan media daerah. Peran *Jawa Pos* sebagai jaringan media daerah ini berkembang pesat sejak tahun 1998.¹⁰ *Jawa Pos* juga menjadi salah satu media yang mengalami intimidasi pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid.¹¹ Ketiga media ini, dengan karakteristik yang berbeda-beda, dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap gambaran dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid.

Pembatasan objek penelitian pada tiga media tersebut tidak hanya bergantung pada alasan-alasan yang tertera saja, melainkan mempertimbangkan kemudahan dan ketersediaan akses data. Penelitian sejarah tentunya memerlukan arsip primer dalam hal ini arsip surat kabar dan majalah yang menjadi syarat mutlak validnya data. Ketiga media yang dipilih memiliki rekam jejak dokumentasi arsip yang dapat diakses sepenuhnya oleh penulis untuk melacak dinamika pemberitaan pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena era pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid merupakan era pembuka bagi geliat kebebasan pers di Indonesia. Selain itu, penelitian ini tidak hanya membahas mengenai dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid saja, tetapi penelitian ini juga akan menganalisis mengenai kesesuaian antara praktik kebebasan pers dengan regulasi dan kebijakan yang diterapkan pemerintah pada masa tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mendalam, serta memberikan kontribusi terhadap sejarah perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Khususnya dalam periode transisi demokrasi pada awal masa reformasi.

C-P.” *Komunikasi*, 3 no 1 (2008), hlm 20.

¹⁰ *Ibid*, hlm 18.

¹¹ Solahudin et.al., *Amuk Massa Gus Dur*. (Jakarta: AJI Indonesia, 2001) hlm 6.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Dinamika Kebebasan Pers Pada Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.” Rumusan masalah tersebut diuraikan lebih lanjut menjadi beberapa pertanyaan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika kebebasan pers pada masa awal transisi Reformasi?
2. Bagaimana kebijakan terkait pers yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid?
3. Bagaimana dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Secara lebih spesifik, penelitian ini juga diarahkan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis dinamika kebebasan pers pada masa awal transisi reformasi.
2. Menganalisis kebijakan terkait pers yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
3. Menganalisis dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek utama, yakni secara teoritis maupun praktis yang rinciannya dipaparkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca dalam topik sejarah Indonesia pasca reformasi, khususnya dalam konteks perkembangan kebebasan pers di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun informasi tambahan bagi peneliti yang ingin meneliti topik serupa, terutama mengenai topik kebebasan pers dalam periode pemerintahan tertentu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah agar lebih memahami bagaimana suatu kebijakan dan sikap dapat memengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan ajar sejarah, khususnya dalam pemahaman terkait topik kebebasan pers pada awal masa reformasi.

1.5 Tinjauan Teoretis

1.5.1 Kajian Teori

1.5.1.1 Teori Pers Libertarian

Teori Pers Libertarian dikemukakan oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schram. Teori ini merupakan salah satu dari empat teori yang dikenal sebagai *The Four Theories of Press* yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh tersebut dalam sebuah buku yang berjudul *Four Theories of the Press*. Pers dalam teori ini dipandang bukan menjadi alat pemerintah, melainkan sebagai sarana untuk menyalurkan hati masyarakat dalam memberikan masukan maupun mengawasi

kinerja dari pemerintahan.¹² Dalam arti lain, pers dalam teori ini adalah pengawas pemerintah agar pemerintahan tetap berjalan dengan benar dan semestinya.¹³

Pada dasarnya, tujuan utama dari media adalah membantu menemukan kebenaran, serta terlibat dalam proses penyelesaian sosial dan politik dengan menyajikan berbagai opini dan bukti sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan catatan, kegiatan tersebut haruslah bebas dari kontrol atau dominasi pemerintah. Inilah yang disebut sebagai pers libertarian. Pada negara yang menganut paham liberal, pers bukanlah bagian dari alat pemerintah, pers juga harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran.

Pemberitaan pers yang semakin meningkat kuantitasnya, akan menyebabkan kemungkinan terjadinya ataupun penyampaian opini yang tidak tepat. Pada negara yang menganut paham liberal, negara tidak memiliki hak untuk membatasi apa yang dianggapnya salah dan tidak sehat. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan membiarkan publik terpapar oleh banyaknya pemberitaan dan opini, baik itu yang benar atau salah. Karena pada akhirnya, Publik akan menentukan sendiri keputusan dan pandangan yang mereka ambil. Hal inilah yang merupakan ciri dari masyarakat liberal.¹⁴

Teori libertarian digunakan dalam penelitian ini untuk membantu menganalisis bagaimana kondisi dan perkembangan pers pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Karena periode tersebut menandai masa peralihan sistem pers menuju sistem yang lebih bebas. Dengan menggunakan teori ini, penulis dapat menjawab rumusan masalah ketiga mengenai dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid serta rumusan masalah kedua mengenai kebijakan dan regulasi pemerintah terkait kebebasan pers. Teori libertarian ini membantu penulis untuk menganalisis mengenai situasi kebebasan pers yang terjadi pada masa tersebut dan apakah kebijakan-kebijakan yang

¹² Juita Pauziah et.al., *Etika Dan Filsafat Komunikasi Dalam Realitas Sosial*. (Jakarta Selatan: PT Mahakarya Citra Utama Group, 2023), hlm 48.

¹³ Didit Agus Triyono, "The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory." *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 13 no 3 (2013), hlm 196.

¹⁴ Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm, *Four Theories of the Press* (Illinois: University of Illinois Press 2018), hlm 51.

dikeluarkan pemerintah pada masa tersebut membantu pers untuk bergerak lebih bebas.

1.5.1.2 Teori Ruang Publik

Istilah Ruang Publik dikenalkan pertama kali oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Jürgen Habermas. Pembahasan mengenai ruang publik ini tercantum dalam sebuah buku karya Jürgen Habermas yang berjudul *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* yang terbit pada tahun 1989. Ruang publik merupakan tempat terjadinya pertukaran dan pergulatan berbagai gagasan baik kultural, politik, ekonomi atau sosial. Habermas mengatakan bahwa ruang publik merupakan zona netral yang tidak ada dominasi pemerintah, partai politik, kelompok bisnis atau kelompok kepentingan lainnya yang seharusnya dihindarkan.¹⁵

Habermas mengklasifikasikan ruang publik menjadi dua jenis; (1) ruang publik politik, dan (2) ruang publik sastra. Ruang publik politik tidak hanya memperlihatkan keterbukaan ruang yang dapat diakses, tetapi memperlihatkan pula perubahan struktur sosial masyarakat. Kelas-kelas sosial yang terbentuk dari sistem feodal lambat laun tidak dapat dipertahankan lagi. Sementara itu dalam ruang publik sastra, kesadaran literasi masyarakat mulai meningkat seiring dengan munculnya berbagai penerbitan, diskusi masyarakat mengenai seni, estetika, maupun sastra tersebar di penjuru Eropa.¹⁶

Habermas menjelaskan dalam bukunya, bahwa sejarah ruang publik terbentuk dari tempat-tempat pertemuan seperti warung kopi yang dipakai oleh kaum Borjuis untuk berkumpul dan berdiskusi. Menurut Habermas, terdapat beberapa kriteria dari ruang publik. Yang pertama adalah pengabaian terhadap status, artinya ruang publik tidak memperkarakan terhadap status karena semua orang memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berdiskusi di ruang publik. Kedua adalah fokus pada *domain of common concern*, maksudnya adalah diskusi pada ruang publik haruslah berfokus pada kepentingan publik, bukan kepentingan

¹⁵ Deny Wahyu Tricana, "Media Massa Dan Ruang Publik (Public Sphere), Sebuah Ruang Yang Hilang." *Aristo*, 1 no 1 (2013), hlm 8, <https://doi.org/10.24269/ars.v1i1.1538>.

¹⁶ Moh. Fatul Hasan, "Membaca Ruang Publik Dan Jurnalisme Dalam Perspektif Jürgen Habermas." *Perspektif*, 14 no 1 (2019), hlm 6, <https://doi.org/10.69621/jpf.v14i1.115>.

pribadi. Dan yang terakhir adalah inklusif, bahwa semua kalangan masyarakat berhak berpartisipasi dalam ruang publik.¹⁷

Pada konsep ruang publik ini, pers menjadi salah satu bagian yang memfasilitasi terjadinya diskusi-diskusi di ruang publik. Apa yang disajikan oleh pers tentunya akan sangat mempengaruhi alur diskusi di ruang publik. Sehingga diperlukannya pers yang sehat dan netral sehingga ruang publik yang sehat pun dapat ikut terbentuk.

Pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid merupakan titik dimana ruang publik yang sehat kembali terbentuk kekangan-kekangan yang terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, teori ruang publik diperlukan untuk membantu menganalisis sejauh mana kebebasan pers turut memperluas ruang bagi partisipasi publik.

1.5.1.3 Teori Pers Tanggungjawab sosial

Teori pers tanggungjawab sosial adalah salah satu dari empat teori yang dikenal sebagai *The Four Theories of Press* dan dikategorikan sebagai teori normatif. Teori ini dicetuskan oleh Theodore Peterson dalam bukunya yang berjudul *Four Theories of the Press* dan dinyatakan sebagai pergeseran dari Teori Liberal.¹⁸ Teori Pers tanggungjawab sosial ini merupakan pengembangan dari teori pers libertarian.

Teori pers tanggungjawab sosial muncul dan berkembang pada pertengahan abad ke XX di Amerika Serikat. Teori ini muncul sebagai respon terhadap teori libertarian yang dianggap gagal menjalankan fungsinya pada saat itu. Saat itu, pers di Amerika Serikat yang menganut sistem liberal memiliki kebebasan mutlak dalam memproduksi berita dan informasi. Namun, hal ini menimbulkan masalah. Banyak media yang menyebarkan informasi yang kurang akurat dan memproduksi berita demi mengejar keuntungan semata. Hal ini membuat masyarakat resah, sehingga dibentuklah *The Commission on Freedom of the Press* yang bertugas untuk menyelidiki mengenai kebebasan pers yang berlangsung di Amerika Serikat pada

¹⁷ Rulli Nasrulah, "Internet Dan Ruang Publik Virtual." *Jurnal Komunikator*, 4 no 1 (2012), hlm 28.

¹⁸ Triyono, *op.cit.*, hlm 198.

saat itu. Pasca 2 tahun berdebat, komisi ini mempublikasikan laporannya dalam bentuk buku yang berjudul *A Free and Responsible Press* pada tahun 1947, beserta buku lain karangan anggota komisi bernama William E. Hocking, yang berjudul *Freedom of The Press: A Framework of Principle*.¹⁹

Pada dasarnya, teori pers tanggung jawab sosial memiliki dasar, asumsi utama serta fungsi yang sama dengan teori pers libertarian, hal ini dikarenakan teori pers tanggungjawab sosial ini merupakan turunan dari teori pers libertarian. Perbedaan antara teori pers libertarian dan teori pers tanggung jawab sosial adalah bahwa dalam teori tanggung jawab sosial menerima peran pers dalam memberi informasi kepada masyarakat, melayani sistem politik serta menjaga hak-hak perseorangan, namun teori ini menyatakan bahwa selama ini pers tidak menjalankan fungsi ini secara ideal. Teori ini menerima peran pers untuk melayani sistem ekonomi, tetapi tidak menghendaki diunggulkannya fungsi pelayanan ekonomi melebihi fungsi pendukung terhadap proses demokrasi atau memberikan informasi kepada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial menerima peran pers dalam menampilkan hiburan, dengan syarat hiburan itu harus “baik”. Terakhir, teori ini menerima keharusan pers sebagai lembaga yang bebas finansialnya, tetapi teori ini akan melarang beberapa media tertentu memasuki pasaran apabila diperlukan.²⁰

Teori tanggungjawab sosial sendiri secara keseluruhan tidak menolak sepenuhnya prinsip dari teori libertarian. Pers dalam teori tanggung jawab sosial sendiri memiliki posisi dalam pemerintahan yang demokratis, sehingga pers harus bertanggung jawab secara moral dan sosial kepada masyarakat. Artinya, pers memang berhak terlepas dari kontrol dan campur tangan pemerintah. Kebebasan yang dimiliki pers ini tidak boleh disalahgunakan karena pers memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori tersebut untuk membantu menganalisis bagaimana perilaku pers ketika aturan aturan yang mengekang kebebasan pers dicabut pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid. Bagaimana pers

¹⁹ Permana, Rendra. . “Tinjauan Kritis Konsep Dan Aplikasi Teori Pertanggungjawaban Sosial Pers Di Dunia Pers Indonesia.” *Sosiohumaniora*, 7 no 3 (2005), hlm 275.

²⁰ *Ibid*.

menggunakan kebebasan yang mereka dapatkan dan apakah mereka juga menjalankan tanggungjawab sosialnya dengan baik.

1.5.2 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bahan bacaan atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, terdapat beberapa literatur yang dijadikan rujukan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

Pertanyaan penelitian pertama tentang bagaimana dinamika kebebasan pers pada masa awal transisi reformasi menggunakan kajian pustaka yang berasal dari artikel jurnal *Mediator* yang berjudul *Menakar Kadar Kebebasan Pers Indonesia 1998-2003*. Penelitian ini membahas mengenai dinamika kebebasan pers di Indonesia pada tahun 1998 sampai tahun 2003. Selain itu, penelitian ini juga mengukur kadar kebebasan pers di Indonesia pada masa tersebut dengan menggunakan data-data tentang rating kebebasan pers serta kasus-kasus pelanggaran kebebasan pers yang terjadi selama periode tahun 1998-2003. Kajian pustaka selanjutnya yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah disertasi berjudul *Political Communication in Indonesia: An Analysis of the Freedom of the Press in the Transition Process after the Downfall of the Soeharto Regime (1998–2004)*. Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang transformasi kebebasan pers di masa transisi politik dalam konteks komunikasi politik, dengan periode waktu dari tahun 1998 hingga tahun 2004. Selain itu, penelitian ini juga memiliki bab khusus yang membahas mengenai hubungan pemerintah dan media serta ketegangan yang terjadi antara Abdurrahman Wahid dan media pada masa tersebut. Kajian pustaka tersebut akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama mengenai dinamika kebebasan pers pada masa awal transisi Reformasi yang tertera di bab 2.

Pertanyaan penelitian kedua tentang apa saja kebijakan terkait pers yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid akan dijawab menggunakan kajian pustaka yang berasal dari artikel ilmiah pada *Indonesian Journal of Law and Justice* yang berjudul *Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. Artikel ini

membahas mengenai kriteria kebebasan pers sesuai UU No. 40 Tahun 1999, serta sistem kontrol terhadap kebebasan pers dalam pemberitaan sesuai Undang-Undang yang sama. Penelitian tersebut akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua mengenai kebijakan terkait pers yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang tertera di bab 3.

Pertanyaan penelitian ketiga tentang bagaimana dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid akan dijawab menggunakan kajian pustaka berupa buku yang berjudul *Politics and the Media in Twenty-First Century Indonesia* yang disunting oleh Krishna Sen dan David T. Hill. Meskipun rangkaian waktu pembahasan dalam buku ini cukup panjang, namun buku ini mengkaji mengenai kondisi media setelah reformasi. Termasuk masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid di dalamnya. Kajian pustaka tersebut akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga mengenai dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang tertera di bab 4.

1.5.3 Penelitian Yang Relevan

Pembahasan mengenai penelitian yang relevan mengacu pada penelitian terdahulu atau hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik itu berupa artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi ataupun laporan penelitian yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang relevan yang telah ditemukan oleh penulis di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama adalah artikel ilmiah yang berjudul Menakar Kadar Kebebasan Pers Indonesia 1998-2003 yang ditulis oleh Awang Ruswandi dan diterbitkan dalam jurnal Mediator. Penelitian ini membahas mengenai pengukuran kadar kebebasan pers di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, melalui data-data tentang rating kebebasan pers serta kasus-kasus pelanggaran kebebasan pers yang terjadi selama periode tahun 1998-2003. Penelitian ini memang membahas mengenai kebebasan pers pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Namun pembahasannya lebih menekankan pada pengukuran kadar kebebasan lewat skor dan penghitungan jumlah kasus pelanggaran kebebasan yang terjadi pada masa

tersebut. Selain itu, penelitian tersebut juga membahas tentang pengukuran kadar kebebasan pers dalam kurun waktu 1998 hingga 2003, sehingga penelitiannya tidak terfokus pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid saja. Berbeda dengan penelitian ini yang akan menggunakan pendekatan sejarah untuk fokus membahas mengenai dinamika kebebasan pers pada periode pemerintahan Presiden Abdurrahman.

Penelitian terdahulu selanjutnya berupa artikel ilmiah yang berjudul *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia* yang ditulis oleh Satrio Saptohadi, dan diterbitkan di *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 11 No. 1, tahun 2011. Dalam penelitian ini, Saptohadi menegaskan bahwa kebebasan pers di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan politik nasional. Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai dinamika kebebasan pers di Indonesia sejak masa awal Orde Baru hingga era reformasi. Namun penelitian ini belum membahas secara mendalam mengenai dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, penelitian ini akan secara spesifik membahas mengenai dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan menggunakan pendekatan historis.

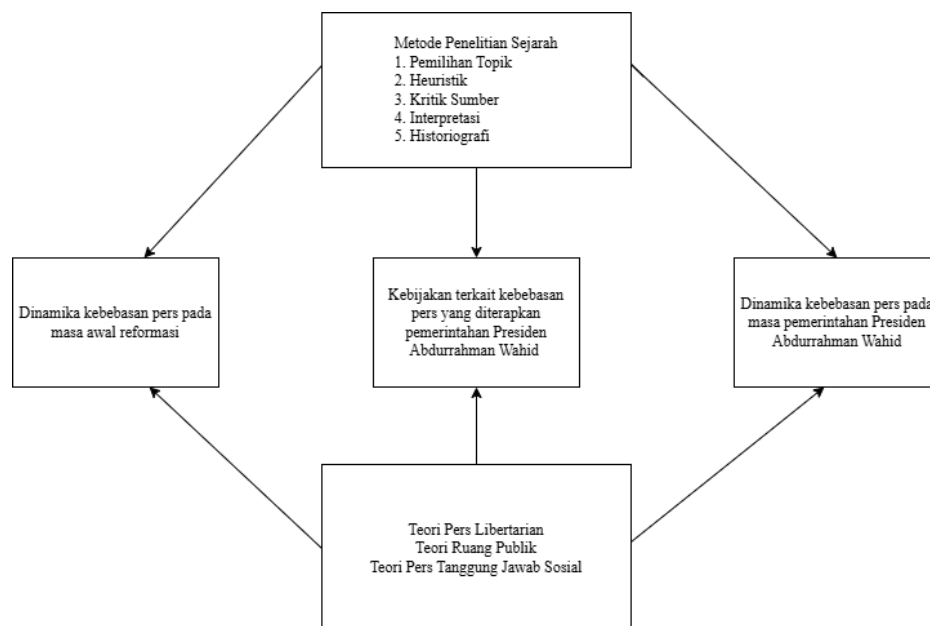
Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini selanjutnya berupa artikel ilmiah yang berjudul *Perkembangan Pers Indonesia Sebagai Identitas Bangsa Pada 1945-1998* yang ditulis oleh Arum Asti Andani dan Muhammad Iqbal Birsyada (2024). Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pers di Indonesia pada tahun 1945-1998 serta bagaimana pers membentuk identitas bangsa. Perbedaan antara penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas mengenai perkembangan pers di Indonesia pada tahun 1945 hingga 1998, sementara penelitian ini akan membahas mengenai dinamika kebebasan pers pada rentang waktu pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah artikel ilmiah yang berjudul *Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950–1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional* yang ditulis oleh Andi Suwirta (2008). Penelitian ini membahas mengenai dinamika kehidupan pers di Indonesia pada tahun 1950 hingga 1965 yang perjalannya banyak diwarnai tekanan politik karena kehidupan

negara dan konflik antar elit politik pada saat itu. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan dan rentang waktu pada pembahasannya. Penelitian tersebut membahas mengenai dinamika kehidupan pers di Indonesia pada tahun 1950 hingga 1965, sementara penelitian ini membahas mengenai dinamika kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau 1999-2001.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sebuah kerangka yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai alur pemikiran penulis dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka ini menunjukkan hubungan antar konsep dalam penelitian ini yang berjudul “Dinamika Kebebasan Pers Pada Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.” Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

Pada gambar yang telah disajikan di atas, dapat dilihat bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis mengenai dinamika kebebasan pers pada masa awal reformasi, kebijakan yang diterapkan terkait kebebasan pers pada masa pemerintahan Presiden

Abdurrahman Wahid, serta dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan tiga teori sebagai alat analisis untuk membantu mengungkap permasalahan dan pertanyaan penelitian. Tiga teori tersebut ialah teori pers libertarian, teori ruang publik serta teori pers tanggung jawab sosial.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah serangkaian tahapan sistematis dan aturan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Pengertian metode sejarah tersebut dapat disimpulkan sebagai sebuah sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah.²¹ Alasan penulis menggunakan metode penelitian sejarah adalah karena penelitian ini akan mengkaji mengenai dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dari perspektif sejarah. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari:

1.6.1.1 Pemilihan Topik

Topik penelitian ialah kejadian atau peristiwa (fenomena), atau pokok persoalan yang akan dijadikan sebagai subyek penelitian.²² Kuntowijoyo menyebutkan bahwa langkah pertama yang wajib dilakukan dalam penelitian sejarah adalah memilih topik. Pemilihan topik penelitian sejarah memiliki beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yakni kedekatan emosional dan kedekatan

²¹ Wasino, & Endah Sri Hartantik, E. *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*. (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2018), hlm 19.

²² Nina Herlina, *Metode Sejarah*. (Bandung: Satya Historika, 2020) hlm 89.

intelektual.²³ Kedekatan emosional lahir dari ketertarikan peneliti yang berdasarkan perasaan. Kedekatan emosional diperlukan untuk menciptakan motivasi bagi penulis dalam melakukan penelitian. Sementara kedekatan intelektual diperlukan untuk membantu peneliti bekerja karena sesuai dengan minat dan penguasaan materi terhadap topik yang dikaji. Setelah menemukan topik, tahapan selanjutnya adalah membuat rencana penelitian. Rencana penelitian itu perlu berisi permasalahan, historiografi, sumber sejarah dan garis besar penelitian.²⁴

Penulis memutuskan untuk mengambil topik mengenai dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid didasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional yang dialami penulis berkaitan dengan penelitian ini adalah karena penulis merasa isu kebebasan pers adalah isu yang menarik dan relevan dengan dinamika sosial politik masa kini. Aspek kedekatan intelektual muncul setelah penulis mendalami dan menganalisis mengenai dinamika kebebasan pers di Indonesia pada masa Orde Baru. Kedua hal tersebut kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid.

1.6.1.2 Heuristik

Heuristik, yang dapat diartikan sebagai penelusuran jejak daripada sumber-sumber.²⁵ Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber sejarah disebut sumber primer apabila disampaikan oleh saksi mata, misalnya dokumen tertulis, artefak, ataupun sumber lisan.²⁶ Sumber sekunder ialah tulisan atau benda-benda yang tidak semasa, baik yang berasal dari pelaku sejarah maupun yang berasal dari orang lain.²⁷ Dalam hal ini, perlu dibedakan antara sumber sekunder dengan sumber kontemporer (sumber sezaman). Untuk mudahnya, sumber sekunder dapat dikatakan sebagai sumber

²³ Kuntowijoyo, "Pengantar Ilmu Sejarah." (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), hlm 70-72.

²⁴ *Ibid*, hlm 72.

²⁵ Aditia Muara Pradiatra, *Ilmu Sejarah Metode Dan Praktik*. (Gresik: JSI Press, 2020), hlm 34.

²⁶ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm 73.

²⁷ Miftahudin, *Metodologi Penelitian Sejarah Lokal*. (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm 64.

tidak hidup sezaman. Sumber sekunder adalah sumber yang telah diolah lebih dahulu, seperti buku.²⁸ Beberapa sumber yang berhasil penulis kumpulkan di antaranya adalah:

- 1) Arsip majalah *Tempo* terbitan tahun 1998-2001 edisi berikut:
 - a) Edisi 12 Januari 1991 dengan laporan utama “Cengkeh Milik Siapa.”
 - b) Edisi 4 Januari 1992 dengan artikel yang berjudul “Angka Misterius Santa Cruz.”
 - c) Edisi 11 Juni 1994 dengan artikel yang berjudul “Plus Minus Armada Bekas.”
 - d) Edisi 12 Oktober 1998 dengan artikel yang berjudul “Siapa Yang Diperkosa, Mei Lalu.”
 - e) Edisi 21 Desember 1998 dengan artikel yang berjudul “Sejak Dulu ABRI Berbisnis.”
 - f) Edisi 5 Desember 1999 dengan laporan utama “Kesaksian Para Jenderal, Dari Aceh Hingga Timor Timur.”
 - g) Edisi 21 Februari 2000 dengan artikel yang berjudul “Boikot Media dan Boikot Informasi.”
 - h) Edisi 12 Maret 2000 dengan laporan utama “Jejak Korupsi di Markas Polisi.”
 - i) Edisi 28 Mei 2000 dengan artikel yang berjudul “Dan Lumbung itupun Bobol.”
 - j) Edisi 11 Februari 2001 dengan artikel yang berjudul “Jurus Menjinakkan Pers”
- 2) Arsip Koran *Kompas* terbitan tahun 1998-2001 sebagai berikut:
 - a) Artikel dalam Koran *Kompas* edisi 14 Agustus 1998 halaman 6 yang berjudul “Mendagri Resmi Adukan Media Massa.”
 - b) Artikel dalam Koran *Kompas* edisi 9 September 1998 halaman 9 yang berjudul “Kodam Jaya Tuntut Tajuk.”

²⁸ Herlina, *op.cit.*, hlm 26.

- c) Artikel dalam Koran *Kompas* edisi 23 Februari 1999 halaman 4 yang berjudul “Tajuk Rencana: Kasus Panji Masyarakat Batu Ujian untuk Kebebasan Pers.”
 - d) Artikel dalam Koran *Kompas* edisi 30 November 1999 halaman 7 yang berjudul “Tokoh dan Ulama Aceh Diundang Abdurrahman Wahid, Referendum Jalan Tengah Penyelesaian Masalah Aceh.”
 - e) Artikel dalam Koran *Kompas* edisi 7 Mei 2000 halaman 2 yang berjudul “Didemo, *Jawa Pos* tak Terbit.”
 - f) Artikel dalam Koran *Kompas* edisi 9 Mei 2000 halaman 1 yang berjudul “Presiden Abdurrahman Wahid: Ada Komplotan untuk Menjatuhkan Saya.”
 - g) Artikel dalam Koran *Kompas* edisi 12 Juni 2000 halaman 28 yang berjudul “Menonton Pengusutan Kasus Bulog.”
 - h) Artikel dalam Koran *Kompas* edisi 19 Januari 2001 halaman 20 yang berjudul “Kantor Radar Cirebon Dirusak Massa.”
 - i) Artikel dalam Koran *Kompas* edisi 31 Januari 2001 halaman 1 yang berjudul “Buloggate Refleksi Kelemahan Besar Pemerintahan.”
 - j) Artikel dalam Koran *Kompas* edisi 19 April 2001 halaman 20 yang berjudul “Konflik Maluku, Ini Perang Apa?”
 - k) Artikel dalam Koran *Kompas* edisi 29 Mei 2001 halaman 7 yang berjudul “Skandal Keuangan Yanatera dan Sumbangan Sultan Brunei: Presiden Abdurrahman Wahid Tidak Terbukti Terlibat.”
 - l) Artikel dalam Koran *Kompas* edisi 3 Agustus 2001 halaman 20 yang berjudul “Masih Minim, Peran Pers Menciptakan Perdamaian.”
 - m) Artikel dalam Koran *Kompas* edisi 15 Agustus 2001 halaman 20 yang berjudul “Gerakan Aceh Merdeka Bredel *Serambi Indonesia*.”
- 3) Arsip Koran *Jawa Pos* terbitan tahun 1998-2001 sebagai berikut:
- a) Artikel dalam Koran *Jawa Pos* edisi 15 April 1999 halaman 1 yang berjudul “Gus Dur Dicekal Sendiri Oleh PB NU, Dianggap Mendua, Tak Boleh Ngomong Soal PKB.”

- b) Artikel dalam Koran *Jawa Pos* edisi 6 Mei 2000 halaman 1 yang berjudul “Laksamana Ancam PTUN-kan Gus Dur.”
- c) Artikel dalam Koran *Jawa Pos* edisi 6 Mei 2000 halaman 3 yang berjudul “PKB Gerah, PB NU Bentuk Tim Klarifikasi.”
- 4) Artikel yang diterbitkan oleh The Washington Post pada tahun 1999 yang berjudul “*Controls Eased On Journalists In Indonesia.*”
- 5) Artikel yang diterbitkan oleh *Comitte to Project Journalist* yang berjudul “*Attacks on the Press 2000: Indonesia*” dan “*Attacks on the Press 2001: Indonesia.*”
- 6) Buku terbitan Asosiasi Jurnalis Indonesia yang berjudul “Amuk Massa Abdurrahman Wahid” dan diterbitkan tahun 2001.

1.6.1.3 Verifikasi

Verifikasi atau kritik sumber adalah suatu proses yang dilakukan untuk menguji keaslian dan kredibilitas sebuah sumber. Terdapat dua jenis kritik sumber, yakni kritik intern dan kritik ekstern. Kritik ekstern bertujuan untuk memeriksa autensitas atau keaslian sebuah sumber, sementara kritik intern bertujuan untuk menguji kredibilitas atau kebiasaan dipercayai sebuah sumber.²⁹

Kritik ekstern adalah tahapan penentuan asli atau tidaknya sebuah sumber atau dokumen. Verifikasi atau pengujian sumber pada tahap ini, menyangkut aspek-aspek eksternal dari sumber tersebut, seperti dimana kapan atau siapa penulis sumber tersebut. Kritik intern merupakan penentuan bisa atau tidaknya keterangan dalam dokumen digunakan sebagai fakta sejarah. Pengujian datanya dapat dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap isi buku yang telah dibaca, memperhatikan kesalahan-kesalahan yang muncul dalam bacaan, juga memperhatikan relevansi argumentasi yang digunakan dalam penelitian, selain itu, peneliti dapat membedakan isi buku yang kadar ilmiahnya tinggi dan yang rendah.³⁰

Dalam penelitian ini, penerapan kritik ekstern dilakukan dengan melihat tanggal penerbitan dari artikel, buku ataupun majalah yang dijadikan sumber

²⁹ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm 77.

³⁰ Alian. “Metodologi Sejarah Dan Implementasi Dalam Penelitian.” *Criksetra* 2 no 2 (2020), hlm 10.

primer. Selain itu, penulis juga memastikan keaslian sumber yang diambil dalam platform digital dengan melihat web asal sumber tersebut. Sementara, penerapan kritik intern dilakukan oleh penulis dengan membandingkan berbagai sumber. Misalnya, dalam pembahasan mengenai kasus penyerbuan kantor Jawa Pos oleh massa pendukung Presiden Abdurrahman Wahid. Penulis pertama kali menemukan informasi mengenai kasus ini di buku *Amuk Massa Gus Dur* karya Solahudin, penulis kemudian mencari arsip berita yang mendukung dimana penulis menemukan artikel Jawa Pos yang memicu amarah massa Presiden, yakni edisi 6 Mei 2000 yang berjudul “Enam Bulan Memerintah, KKN Mulai Menerpa Gus Dur? PKB Gerah, NU Bentuk Tim Klarifikasi.” Penulis juga mencari pemberitaan kasus ini dari perspektif media lain, yang penulis temukan dari pemberitaan Kompas edisi 7 Mei 200 yang berjudul “Didemo, Jawa Pos Tak Terbit.” Penulis memastikan apakah kasus penyerbuan Kantor Jawa Pos yang ditulis di buku benar dan sama dengan pembahasan dari sumber lain, termasuk kronologi dan penyebab kejadian. Hal ini dilakukan agar informasi yang dicantumkan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1.6.1.4 Interpretasi

Sumber yang telah melalui tahapan verifikasi, setelahnya dilakukan tahapan interpretasi. Interpretasi ataupun penafsiran merupakan sebuah upaya menetapkan makna dan saling hubungan antara fakta-fakta yang diperoleh.³¹ Terdapat dua tahapan dalam proses interpretasi, yakni analisis yang artinya menguraikan dan sintesis yang artinya menyatukan.³²

Analisis berarti menguraikan, maksudnya ialah merincikan fakta-fakta yang telah dipastikan menjadi fakta sejarah melalui sumber-sumber yang telah lolos tahap verifikasi. Sintesis berarti menyatukan, yakni mengklasifikasikan data-data menjadi satu yang selanjutnya dilakukan penyimpulan.³³ Proses sintesis ini menyatukan fakta-fakta yang ditemukan pada proses analisis untuk kemudian dilakukan penyimpulan.

³¹ *Ibid*, hlm 11.

³² Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm 78-79.

³³ Miftahuddin, *op.cit.*, hlm 81.

Interpretasi ini sangat diperlukan dalam penelitian sejarah, karena interpretasi ini membantu menguak fakta dan data yang terdapat dalam sumber-sumber agar diketahui penafsirannya. Dalam interpretasi baik analisis maupun sintesis, peneliti bisa berbeda pendapat. Perbedaan interpretasi sendiri sah, meskipun terdapat kesamaan data.³⁴ Penafsiran ini bergantung dari sudut pandang seseorang dalam melihat peristiwa atau bukti sejarah yang ada. Peneliti melakukan interpretasi setelah melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber yang telah berhasil penulis kumpulkan.

1.6.1.5 Historiografi

Langkah terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi adalah tahapan penulisan dan penjalinan hasil interpretasi fakta-fakta menjadi suatu kisah sejarah yang selaras.³⁵ Penulisan sejarah dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan ditafsirkan, data-data tersebut kemudian dirangkai menjadi sebuah narasi pemaparan dari suatu peristiwa sejarah.

Penulisan laporan disusun berdasarkan serialisasi, yang terdiri dari kronologis, kausasi dan imajinasi. Penulisan sejarah sedapat mungkin disusun berdasarkan kronologis, ini sangat penting agar peristiwa sejarah tidak menjadi kacau. Kausasi juga sangat penting, karena proses mencari sebab dan akibat akan memperjelas jalannya suatu peristiwa. Imajinasi juga diperlukan dalam penulisan sejarah. Imajinasi yang dimaksud di sini bukan dalam arti imajinasi yang fiktif seperti terdapat pada sastra, melainkan imajinasi yang masih dituntun oleh fakta sejarah yang ada.³⁶

Pada tahap historiografi ini, penulis menyusun hasil interpretasi menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.”

³⁴ Herlina, *op.cit.*, hlm 60.

³⁵ *Ibid*, hlm 123.

³⁶ Alian, *op.cit*, hlm 12.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan sudut pandang yang digunakan dalam meninjau serta mengupas suatu permasalahan, dari bagian mana peneliti memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur apa mana yang diungkapkan.³⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik dan pendekatan sosial.

Penelitian sejarah yang membutuhkan narasi terkait dengan peristiwa politik, tentunya memerlukan konsep-konsep dan teori ilmu politik sebagai alat analisis sejarah. Kajian sejarah dapat menggunakan konsep-konsep atau teori yang dimiliki ilmu politik sebagai alat analisis, misalnya *political culture*, organisasi, sistem politik, demokrasi, konstitusi, *bargaining*, birokrasi, kharisma, *patron-client*, kepemimpinan, konflik, dan korupsi.³⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan politik untuk mengkaji kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan pers. Pendekatan politik juga digunakan untuk mengkaji hubungan antara pemerintah dengan pers dan bagaimana pemberitaan pers berpengaruh terhadap stabilitas politik pada masa tersebut.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah kerangka kerja atau struktur yang digunakan untuk menyusun pembahasan dalam penelitian. Sistematika ini membantu peneliti menyampaikan informasi secara sistematis dan sesuai dengan kronologi, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami alur pemikiran dan analisis yang disajikan. Penelitian yang berjudul “Dinamika Kebebasan Pers Pada Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid” ini memiliki beberapa bab dengan susunan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang pengambilan topik terkait dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, rumusan masalah, tujuan penelitian,

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Miftahudin, *op.cit.*, hlm 46.

manfaat penelitian, tinjauan teoritis, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi hasil penelitian mengenai dinamika kebebasan pers pada masa awal transisi Reformasi. Bab ketiga berisi hasil penelitian mengenai identifikasi kebijakan terkait pers yang diterapkan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Bab keempat berisi tentang hasil penelitian mengenai dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Bab lima berisi penutup dan kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini, yang membahas mengenai dinamika kebebasan pers pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid. Di bagian ini juga akan disampaikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Pada bagian akhir terdapat daftar pustaka, yang berisi sumber-sumber yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini.